

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO

Rd. Ade Purnawan<sup>1\*</sup>, Lusi Rahmawati<sup>2</sup>, Nurbudiwati<sup>3</sup>, Rd. Putri Aprilia Nuraini<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Garut, Garut, Indonesia

\*Korespondensi : [ade.purnawan@fisip.uniga.ac.id](mailto:ade.purnawan@fisip.uniga.ac.id)

### ABSTRAK

Kemiskinan dan Kerentangan pangan di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga pemerintah Indonesia selama waktu yang lama telah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat beberapa program sosial. Salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Sembako. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses implementasi program sembako di Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang menekankan pada empat dimensi utama yang mempengaruhi suatu proses kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai penting dalam konteks lokal, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, baik dari segi kebijakan publik maupun kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian yang dilakukan di Desa Mekargalih. Penetapan informan dilakukan teknik purposive sampling dengan 6 informan terpilih. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program sembako di Desa Mekargalih belum berjalan secara maksimal berdasarkan empat dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator yang terjadi, seperti masyarakat yang merasa terbebani karena harus pergi jauh ke kantor pos, tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan, kurangnya pemahaman KPM terhadap bantuan yang diterima, ketidak tepat sasaran dalam menentukan KPM sehingga tujuan program belum terlaksana secara optimal.

**Kata Kunci :** Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Program Sembako.

### ABSTRACT

*Poor people in Indonesia finds difficulties in fulfilling their nutritional food needs. The Ministry of Social Poverty and food insecurity in Indonesia are highly complex issues that have long been the focus of the government's attention. In an effort to address these challenges, the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia has implemented the Sembako Program as a means of fulfilling the basic needs of the population. This research aims to depict the implementation process of the Sembako Program in Mekargalih Village, Tarogong Kidul District, Garut Regency. The study utilizes Edward III's policy implementation theory, which emphasizes four primary dimensions influencing the policy process: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research methodology employed is descriptive qualitative, with the research subjects being the residents of Mekargalih Village. The selection of informants was carried out using purposive sampling, involving 6 selected*

*informants. Data collection techniques and tools encompassed observation, interviews, documentation, and literature review. The research findings indicate that the implementation of the Sembako Program in Mekargalih Village has not been fully optimized across the four dimensions studied. This is attributed to several indicators, such as community members feeling burdened by the need to travel to the post office, suboptimal socialization efforts, lack of understanding among the program beneficiaries, and inaccuracies in identifying the program's target recipients, thus hindering the optimal achievement of the program's objectives. This research holds significance within the context of public policy and can contribute to an enhanced understanding of the obstacles to implementing social assistance programs at the local level.*

*theory is used to explain the importance of attention, understanding, and acceptance in forming attitudes towards new information.*

**Keywords :** Public Policy, Policy Implementation, Sembako Program.

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan (*poverty*) masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Adella et al., 2023). Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana individu atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, Pendidikan, maupun kesehatan (Nawir et al., 2022). Berdasarkan Pasal 34 Ayat 1 UU 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, Selain itu, Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”.

Berbagai program dan inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah (khususnya Kementerian Sosial RI) untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk menerima bantuan sosial. Program Perlindungan Sosial diantaranya Program Keluarga Harapan, program Bantuan Sosial Pangan (Bansos) untuk keluarga miskin, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), dan program pemberdayaan sosial melalui Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta Program Pangan Sembako yang baru diluncurkan pada Desember tahun 2020 (Hermawati, 2020).

Regulasi program sembako ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan Program Sembako (Mikhael et al., 2021). Program ini menggambarkan tujuan umum dari program tersebut, yang adalah untuk mengatasi kemiskinan dalam bentuk sembako yang bertujuan mentransformasikan bentuk bantuan menjadi tunai dan non tunai. “Transformasi menjadi program sembako dilakukan untuk meningkatkan perlindungan sosial dan meningkatkan efisiensi program bantuan sosial pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat” (Kristina Apriliani Putri, 2021). Tujuan utama program sembako ialah untuk penerima manfaat tercukupi gizi setiap bulannya, mencegah stunting dan meningkat tahan pangan di penerima program. Program Sembako dilakukan agar tepat sasaran, kuantitas, waktu, harga, kualitas dan administrasi terpenuhi yang dikembangkan awalnya adalah BPNT (Bantuan Program Pangan Non-Tunai

(Sanjaya & Akhmadi, 2022).

Program ini telah dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti yang dilakukan di kabupaten garut sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, dimana Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) populasi miskin di Garut pada tahun 2022 akan mencapai 10,42% dari sekitar 2.675.547 orang (Herdiana, 2023). Artinya sekitar 276.670 penduduk digarut dikategorikan miskin dan sebanyak 82.170 dikategorikan miskin ekstrim. Salah satu desa yang masyarakatnya mendapatkan Sembako adalah Desa Mekargalih, dengan jumlah penerima sembako pada tahun 2023 mencapai 948 warga, dengan jenis sembako yang diterima berupa 10 kg beras bulog/KPM seperti data dibawah ini

Pada implementasi program sembako di Desa Mekargalih, terjadi beberapa masalah yang kemudian mengindikasikan tidak tercapainya tujuan dari program sembako itu sendiri. Terdapat lima permasalahan yang timbul, yaitu: (1) tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan (2) Kurangnya sumber daya finansial, (3) tidak tersalurkannya bantuan dengan tepat sasaran, (4) kurangnya pemahaman KPM terhadap penyaluran bantuan yang diterima

Berdasarkan gambaran latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Program Sembako di Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

### **Kajian Teori**

#### **1. Implementasi Kebijakan**

Pengertian kebijakan publik menurut W.N. Dunn adalah suatu daftar tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian

kriminalitas, dan pembangunan perkotaan. *Public policy is whatever governments choose to do or not to do* (Dye, 2017). Kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Menurut William N Dunn dalam buku analisis kebijakan yang ditulis oleh Intan Fitri Meutia, Ph.D 2017, ada tiga Tahapan kebijakan publik yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan yang tidak boleh dilewatkan. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi.

Edwards III mengusulkan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu: (1) faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (2) faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?. Berdasarkan dua pertanyaan tersebut, dirumuskan empat faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses pelaksanaan, yaitu

1) Komunikasi. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, penting bahwa para Implementor perlu memahami dengan jelas tugas-tugas yang harus mereka laksanakan dan tujuan serta sasaran kebijakan harus secara efektif

disampaikan Kepada Kelompok Sasaran (target group) (Yuliah, 2020). Ini membantu mengurangi distorsi dalam pelaksanaan dan memahami dengan baik tujuan dan sasaran kebijakan

- 2) Sumber Daya. Jika para pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat terhambat, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten (Delpiero Roring et al., 2021). Sumber daya yang diperlukan dapat berwujud sumber daya manusia, seperti kompetensi implementor, dan sumber daya finansial (Paliema, 2013)
- 3) Disposisi. Karakteristik dan watak implementor, seperti komitmen, integritas, dan sifat demokratis, memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan (Delpiero Roring et al., 2021). Ketika seorang implementor memiliki disposisi yang baik, ia memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan visi dan tujuan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Namun, jika implementor memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda dari pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan dapat menjadi kurang efektif (Aisah et al., 2021).
- 4) Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan sangat memengaruhi implementasi kebijakan. SOP dan fragmentasi adalah komponen struktur organisasi (Mening Subekti, Muslih Faozanudin, 2017). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan

aktivitas organisasi tidak fleksibel

## 2. Program Sembako

Program Sembako dikembangkan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk memastikan sasaran, jumlah, waktu, harga, administrasi, dan kualitas yang tepat, seperti program BPNT (Riyaldi, 2020). Bantuan Program Sembako merupakan bentuk bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, sambil mendorong inklusi keuangan (Purba, 2022). Program Sembako dijalankan melalui sistem perbankan dengan tujuan mendukung tingkah laku produktif penerima bantuan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program dalam hal pengendalian, pemantauan, dan pengurangan penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan program. Menurut Pedoman Umum (2020: 10) tujuan Program Sembako adalah untuk mengurangi pengeluaran keluarga penerima manfaat dengan memberikan sebagian kebutuhan pangan mereka, memberi mereka asupan gizi yang lebih seimbang, dan memberi mereka pilihan dan kontrol atas cara mereka memenuhi kebutuhan pangan mereka (Fahrozi & Novanda, 2023)

Adapun tujuan dan manfaat dari Program Sembako, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, adalah sebagai berikut ini :

- 1) Program Sembako bertujuan untuk:
  - a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  - b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;

- c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
  - d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- 2) Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan ::
- a. Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. Peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;
  - c. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial
  - d. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
  - e. Transaksi nontunai
  - f. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
  - g. Pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi

## B. METODE PENELITIAN

Fokus penelitian mengacu pada implementasi Program Sembako Di Desa Mekargalih. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif. Maksud dari penelitian kualitatif ini guna mendeskripsikan dan menggambarkan dengan sistematis berdasarkan fakta, karakteristik, serta korelasi terkait permasalahan yang akan dianalisis. Penetapan informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan 5 informan terpilih yang berasal dari Dinas Sosial, Desa dan Masyarakat KPM Desa Mekargalih. Teknik dan alat pengumpulan

data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengenai implementasi program sembako di Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan menggunakan teori dari Edward III, yang menekankan 4 Dimensi utama faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan diantaranya Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian dan pembahasan didasarkan pada empat dimensi berikut ini :

### 1. Komunikasi

#### a. Transmisi

Transmisi adalah cara penyampaian informasi yang dilakukan oleh aktor kebijakan kepada sasaran kebijakan. Cara komunikasi yang dilakukan tidak hanya secara langsung atau *door to door*, tetapi juga melalui media komunikasi modern seperti Grup WhatsApp yang dimiliki oleh setiap RT, RW dan melibatkan kader posyandu. Melalui grup ini, informasi terkait program bantuan sembako, jadwal distribusi, serta persyaratan yang harus dipenuhi dapat disampaikan secara efisien kepada Masyarakat.

Proses komunikasi kepada masyarakat dimulai dengan pengumuman dari pihak Pos kepada Desa Mekargalih tentang adanya bantuan yang akan disalurkan, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Setelah itu, pihak Pos akan mengeluarkan surat panggilan dan Daftar Nominatif (Danom) kepada

penerima manfaat. Desa Mekargalih akan menyampaikan informasi dan menyediakan surat panggilan KPM kepada Kepala Dusun (Kadus), yang selanjutnya akan disampaikan ke tingkat RW. Setelah sampai di tingkat RW Desa Mekargalih, informasi akan diturunkan lagi ke tingkat RT. Petugas RT akan melakukan kunjungan langsung ke masyarakat untuk menyebarkan surat panggilan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan memberikan informasi terkait persyaratan serta jenis bantuan sembako yang akan diterima.

b. **Konsistensi**

Penting untuk memastikan bahwa tujuan dari program sembako tetap konsisten sepanjang pelaksanaan. Setiap tahap atau fase program harus selaras dengan tujuan awalnya, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Mekargalih. Sosialisasi yang dilakukan Desa Mekargalih selalu berkesinambungan agar informasi yang disampaikan dapat sampai dan diterima oleh Masyarakat. Mulai dari tujuan dan manfaat program, mekanisme pelaksanaan, jadwal dan lokasi pelaksanaan, sampai dengan persyaratan yang harus dibawa oleh KPM. Selain itu kunci utama dari kekonsistensian ini adalah bentuk dari musyawarah mufakat yang dilakukan desa dalam penyampaian informasi atau sebagai Solusi jika terjadi permasalahan yang timbul. Namun terkadang kekonsistensian ini tidak selalu berjalan dengan baik, dikarenakan walaupun desa sudah

berusaha untuk menyampaikan informasi kepada Masyarakat melalui rt maupun rw, tetapi dari pihak rt dan rw terjadi miss komunikasi yang disampaikan kepada Masyarakat. Sehingga hal tersebut menyebabkan Masyarakat tidak membawa persyaratam secara lengkap pada saat pengambilan bantuan

c. **Kejelasan**

Kejelasan sosialisasi program sembako di Desa Mekargalih menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Sosialisasi yang jelas memainkan peran penting dalam memastikan bahwa informasi terkait program sembako diterima dengan baik oleh penduduk desa. Cara komunikasi dari Desa Mekargalih untuk menyampaikan informasi mengenai pembagian sembako akan di sampaikan kepada 3 dusun untuk disampaikan kepada RW. Adapun tugas dari Dusun 1 meliputi wilayah RW 01, 02 dan 03, Dusun 2 meliputi RW 04, 05, dan 06 dan Dusun 3 meliputi RW 07, 08 dan 09, dari RW informasi akan turun kepada RT dan RT akan menyampaikan langsung kepada masyarakat Mekargalih, baik melibatkan kader posyandu, whatsapp grup yang dimiliki oleh masing-masing RT, maupun secara door to door atau disampaikan langsung kepada masyarakat yang mendapatkan Sembako.

2. **Sumber Daya**

a. **Finansial**

Penting untuk diperhatikan bahwa

keberlanjutan program sembako membutuhkan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi dalam penggunaan dana, pemantauan terhadap dampak program, dan penyesuaian kebijakan berdasarkan evaluasi dapat membantu menjaga keberhasilan dan kelangsungan program sembako. Bantuan sembako yang diterima belum dapat memenuhi kebutuhan pangan Masyarakat KPM, walaupun KPM sudah berusaha agar bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan. Walaupun begitu, KPM desa mekargalih tetap bersyukur dengan adanya bantuan ini, dan menginginkan agar program sembako berjalan seumur hidup.

Selain itu jika dilihat dari segi finansial aktor kebijakan, kontribusi yang didapatkan hanya sebatas kebersihan, yang diperoleh dari 1 KPM/Rp. 1.000. Penting untuk diakui bahwa konsumsi bagi para pelaksana program sembako tidak disediakan, sehingga mereka harus menanggung biaya tersebut dari modal pribadi masing-masing. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa desa hanya berperan sebagai bantuan yang mendukung pemerintah dalam menyalurkan bantuan, tanpa mengharapkan imbalan atas pekerjaan tersebut.

b. Informasi

Penting untuk memastikan bahwa informasi terkait program sembako di Desa Mekargalih tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini mencakup informasi tentang tujuan program, mekanisme

distribusi, dan kriteria penerima manfaat. Tentu saja, informasi yang diperoleh oleh desa bersumber dari pusat untuk mengetahui cara penyaluran sembako kepada masyarakat. Untuk memberikan informasi yang benar, sebelum pelaksanaan program para aktor yang terlibat akan melakukan BIMTEK (bimbingan teknis) yang dilakukan di kantor pos untuk mengetahui syarat-syarat dan tata cara yang harus dilakukan pada saat pembagian sembako kepada Masyarakat dan lain sebagainya

c. Wewenang

Kewenangan dalam menentukan kebijakan terkait program sembako sudah tertuang dalam peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia No 5 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan program sembako. Selain itu ada beberapa aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program sembako, seperti dari kecamatan sebagai operator yaitu Ibu Nani, fasilitator desa yaitu Pak Odang sebagai seksi kesra, dibantu oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), perangkat desa serta diawasi oleh kepala desa

d. Fasilitas

Fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan program ini sudah cukup lengkap, mengoptimalkan fasilitas yang tersedia di Desa Mekargalih seperti meja, kursi, bangunan, Alat Tulis Kantor (ATK), cap, handphone dan lain-lain. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan secara efisien dan terorganisir, yang menjadi pondasi untuk kelancaran

pelaksanaan program bantuan sembako. Jadi dari segi fasilitas sudah mencerminkan komitmen pihak desa untuk memberikan dukungan maksimal kepada kegiatan sosial seperti program sembako ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan Masyarakat

### 3. Disposisi

#### a. Komitmen

Sikap para pelaksana program ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Salah satunya dibuktikan pada sistem Pembagian sembako yang diubah. Pada awalnya pembagian sembako langsung diambil melalui pos atau sistem ojek, tetapi kurang maksimal. Seperti ada KPM yang sakit lalu diwakilkan oleh anaknya, tetapi tidak diterima karena dianggap belum cukup umur, meskipun data di KK sudah mencantumkan nomor identitasnya (NIK). Karena kurang optimal, akhirnya ada pengajuan dari 12 desa di Tarogong Kidul ke kecamatan untuk mencari cara agar juru bayarnya dari desa melibatkan kasi kesra. Dan sampai hari ini juru bayarnya dari desa, sehingga tidak menghambat masyarakat yang sudah menunggu di antrean sejak pagi. Selain dibuktikan dengan 80% dari penerima program sembako sudah mencapai sasaran yang tepat, sisanya masih dalam tahap koreksi agar dapat sesuai dengan target yang ditetapkan

#### b. Kejujuran

Sikap para pelasan sudah jujur, hal ini terbukti ketika terjadi insiden pada proses pembagian sembako beras, di mana beras milik KPM terakhir hilang. Meskipun awalnya

terdapat keraguan dari pihak Desa Mekargalih, namun para perangkat Desa segera mengambil tindakan bertanggung jawab dengan menggantinya melalui pembelian beras baru dari Bulog. Tindakan tersebut mencerminkan kejujuran untuk memastikan bahwa setiap KPM menerima bantuan yang dijanjikan. Sikap ini menunjukkan integritas dan ketulusan para pelaksana dalam menjalankan program bantuan sembako, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa program tersebut dilaksanakan dengan transparan dan penuh tanggung jawab

#### c. Ketaatan dan Kepatuhan.

Ketaatan terhadap kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab selalu diutamakan. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap pedoman distribusi, kriteria penerima manfaat, dan prosedur administratif lainnya. Agar setiap aktor yang terlibat tetap sejalan dengan kebijakan yang ada, maka kepala desa mekargalih yaitu H Ateng Supandi selalu memastikan pekerjaan para aktor yang terlibat melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan

### 4. Struktur Birokrasi

#### a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program sembako telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, dan pedoman umum program sembako 2020.

Dalam pedoman umum program sembako 2020, dijelaskan mengenai Mekanisme Pelaksanaan, antara lain :

- a). Persiapan
- b). Edukasi dan Sosialisasi
- c). Registrasi dan Distribusi KKS
- d). Penggantian KPM
- e). Penyaluran Dana Bantuan
- f). Pemanfaatan Dana Bantuan
- g). Program Sembako Untuk Wilayah Khusus.

Desa Mekargalih terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pembagian sembako. Salah satu langkah yang diambil adalah menentukan loket pembagian berdasarkan abjad, yaitu loket 1 untuk nama yang berawalan A-E dari jam 08:00-10:00, loket 2 untuk nama yang berawalan F-M dari jam 10:00-12:00, dan loket 3 untuk nama yang berawalan N-Z dari jam 13:00-15:00

b. Fragmentasi

Proses fragmentasi pelaksanaan program sembako hingga mencapai Desa Mekargalih diawali oleh berbagai tahapan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kepala Daerah, Sekretaris Daerah (Sekda), Dinas Sosial, hingga tingkat Kecamatan, dan akhirnya mencapai tingkat Desa Mekargalih. Kepala Daerah memiliki peran awal dalam perencanaan dan keputusan strategis terkait program sembako. Sekda turut terlibat dalam mengkoordinasikan berbagai aspek administratif dan organisasional terkait pelaksanaan program tersebut. Dinas Sosial, sebagai instansi terkait juga turut serta dalam koordinasi sebagai pelaksana langsung program sembako. Dinas ini memiliki

tanggung jawab dalam pengawasan, pengendalian, dan pemantauan distribusi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada tingkat Kecamatan, koordinasi dan distribusi program sembako diarahkan agar dapat mencapai seluruh wilayah kecamatan, termasuk Desa Mekargalih. Proses ini melibatkan berbagai pihak di tingkat kecamatan untuk memastikan distribusi sembako sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Terakhir, program sembako sampai ke tingkat Desa Mekargalih, di mana pelaksanaan dan pendistribusiannya dilakukan secara konkret di tingkat desa, yang melibatkan semua pihak mulai dari aparat desa, polsek, koramil, sampai tingkat Rt dan Rw. Sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga terlibat menjadi kunci keberhasilan implementasi program sembako ini

## D. KESIMPULAN

### 1. Komunikasi

Walaupun komunikasi yang dilakukan desa sudah baik, namun masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi seperti kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak RW dan RT yang menyebabkan Masyarakat tidak mengetahui persyaratan yang harus dibawa Ketika mengambil bantuan dan tidak mengetahui waktu pelaksanaan program. Selain itu terkadang Masyarakat juga tidak memahami akan cara penyaluran bantuan program sembako walaupun pada awalnya mereka diberitahukan

terlebih dahulu bahwa sistem Pembagian sembako akan dilakukan per loket.

2. Sumber daya  
Sumber daya pelaksana, sarana dan prasarana sudah cukup baik karena menggunakan fasilitas desa. Namun dari segi finansial perlu untuk ditingkatkan karena tidak ada biaya konsumsi bagi para aktor kebijakan
3. Disposisi  
Sikap para aktor pelaksana sudah cukup komitmen dan bertanggung jawab, hal ini dibuktikan dari data penerima bantuan yang mencapai 948 KPM, selain itu jika ada beras yang hilang maka para petugas akan langsung menggantinya dengan beras bulog yang baru
4. Struktur Birokrasi  
SOP dalam pelaksanaan program mengacu pada peraturan menteri sosial republik Indonesia no 5 tahun 2021 mengenai pelaksanaan program sembako. Selain itu dalam pelaksanaannya ada beberapa pihak yang bekerjasama seperti Dinas Sosial, Kantor Pos, Kecamatan, Desa hingga sampai pada Tingkat RW maupun RT.

#### Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal terkait implementasi program sembako di Desa Mekargalih, yaitu ::

1. Tempat pembagian Bantuan lebih baik dilakukan di Desa Mekargalih secara berkesinambungan, karena pemerintah desa lebih mengetahui keadaan masyarakatnya. Seperti jika ada Masyarakat KPM yang diwakili oleh anggota keluarganya untuk membawa bantuan, maka pemerintah desa bisa langsung mengetahui

bahwa orang tersebut adalah benar keluarganya

2. Agar Masyarakat bisa kondusif, maka waktu Pembagian sembako pertahap 1,2 dan 3 dikembangkan kembali menjadi perloket agar bisa mengefektifkan waktu. Seperti awalan abjad A-E dilakukan pada loket 1, E-M pada loket 2, N-Z pada loket 3. Selain itu jika ada KPM lansia, ibu hamil maupun menyusui agar diprioritaskan terlebih dahulu dalam pelaksanaan Pembagian bantuan sesuai dengan keadaan KPM..
3. Agar tidak adanya kecemburuan sosial, maka pemerintah desa bisa melakukan mediasi dengan Masyarakat, jika bantuan tersebut tidak dibutuhkan oleh KPM mampu, maka bantuan tersebut bisa di berikan kepada Masyarakat yang tidak mampu. Selain itu harus ada update pembaharuan data penerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Agar tercapainya Ketepatan sasaran.
4. Tahapan sosialisasi dilakukan secara berkesinambungan dari aktor pusat sampai dengan RT/RW baik secara door to door maupun melalui media, dengan pengawasan yang dilakukannya agar informasi yang diberikan tetap jelas dan konsisten, sehingga Masyarakat memahami akan program tersebut. Lalu jika ada Masyarakat yang tidak dapat membawa bantuan, maka bantuan tersebut bisa diwakilkan oleh anggota keluarganya, tetapi jika tidak ada anggota keluarga yang datang, maka bantuan tersebut harus

diantarkan oleh perangkat desa mekargalih.

5. Jika bantuan berjenis daging maka lebih baik pemerintah melakukan Pembagian bantuan tersebut dengan mendatangkan secara langsung penjual daging ke Desa Mekargalih, agar daging yang akan diberikan kepada PKM masih Fresh.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agustino, L. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. In *CV. Alfabeta*.
- Cellyana Nainggolan, A., Stiawati, T., & Cadith, J. (2022). Implementasi Program Sembako. *Jurnal Governansi*, 8(1), 39–48. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i1.5627>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition*.
- Fischer, F., & Miller, G. J. (2017). Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods. In J. RABIN & J. T. Aaron Wachhaus (Eds.), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. <https://doi.org/10.4324/9781315093192>
- Gina Anaimah, Ali Anwar Yusuf, & WillyaAchmad. (2023). Implementation Of Staple Food Program For Beneficiary Families In Sawah Kulon Village
- Habibullah, Jayaputra, A., Pudjianto, B., & Muhtar. (2022). Inclusive Finance in Sembako Program: An Overview From Proper Governance Perspective. *Asean Social Work Journal*, 10(2), 24–34. <https://doi.org/10.58671/aswj.v10i2.20>
- Hadita, A., Nurbudiwati, N., & Andriansyah, A. (2021). Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 17–24. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v12i2.80>
- Kasmad, R. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik. In *Research Gate* (Issue September). <https://konsultasiskripsi.com/2019/09/15/indikator-implementasi-kebijakan-publik-skripsi-dan-tesis/>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bantuan Sembako*. 950, 4.
- Kristina Apriliani Putri. (2021). *Efektivitas pengelolaan program sembako dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat(KPM) di Kecamatan Banyumanik*. 1945, 6.
- Mening Subekti, Muslih Faozanudin, A. R. (2017). Implementasi Program Bantuan Operasional Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 58–71. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/index>
- Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020*, 11 (2020) (testimony of Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai).